



Ketahanan Nasional Dalam Bingkai Smart Power Melalui Integrasi Diplomasi Budaya Dan Geostrategi Di Era Globalisasi

Lukluk Zakiya¹, Fitriyah², Zaenul Slam³

^{1,2,3}, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Received: 22 Juli 2026
Revised: 29 Juli 2026
Accepted: 5 Agustus 2026

This research analyzes the implementation of smart power through cultural diplomacy as a strategic element in strengthening Indonesia's national resilience. Amidst globalization dynamics, the use of physical force alone is considered no longer effective for protecting national interests comprehensively. Using a qualitative method, this study explores the integration of soft power such as culinary excellence and digital creativity with existing military strengths. The research findings confirm that well planned cultural diplomacy can strengthen national identity while building a positive image as a shield against foreign influence. Reorienting this strategy is crucial for Indonesia to adapt to shifting world geopolitics while maintaining national sovereignty sustainably. Furthermore, the synergy between traditional values and modern communication platforms is vital for maintaining regional stability. Indonesia must leverage its diverse cultural heritage to build international trust and foster global partnerships. By optimizing these assets, the nation can influence global perceptions and secure its strategic position among other countries. The integration of technology in promoting local wisdom further enhances the effectiveness of this approach. Ultimately, a comprehensive smart power strategy will empower the nation to face multifaceted challenges in the twenty first century while ensuring that national values remain respected on the international stage.

Kata Kunci: *Smart Power, Cultural Diplomacy, National Resilience, Soft Power, Indonesia.*

(*) Corresponding Author: luluzakiyah998@gmail.com¹, fitriahf427@gmail.com²,
zaenul_slam@uinjkt.ac.id³

How to Cite: Zakiya, L., Fitriyah, F., & Slam, Z. (2026). KETAHANAN NASIONAL DALAM BINGKAI SMART POWER MELALUI INTEGRASI DIPLOMASI BUDAYA DAN GEOSTRATEGI DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.D), 231-244. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14006>

PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2026, kondisi politik dunia berubah sangat cepat dan sulit ditebak. Indonesia, dengan posisi wilayahnya yang sangat penting, tidak lagi hanya menghadapi ancaman fisik seperti serangan militer, tetapi juga ancaman tersembunyi yang menyerang jati diri bangsa. Arus globalisasi dan teknologi informasi saat ini membawa risiko baru, mulai dari masuknya paham asing yang tidak sesuai hingga perang opini pada media sosial yang dapat membuat kesalahpahaman pada persatuan. Dalam situasi seperti ini, menjaga keamanan negara tidak cukup hanya dengan mengandalkan senjata atau kekuatan ekonomi saja. (Buzan, 2008; Mearsheimer, 2003)

Tantangan nyata yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bagaimana mempertahankan kedaulatan di tengah ketergantungan global yang masih tinggi. Sebagai negara berkembang, kita harus jujur mengakui bahwa Indonesia masih memerlukan investasi asing, bantuan teknologi, serta kerja sama ekonomi internasional untuk menyokong pembangunan nasional. Namun, posisi "membutuhkan" ini sering kali menjadi celah bagi pihak luar untuk menekan atau mendikte kebijakan strategis kita. Diperlukan sebuah strategi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keharusan menjaga harga diri bangsa.

Alasan utama penelitian ini adalah perlunya memperbarui strategi pertahanan agar Indonesia tidak goyah menghadapi pengaruh budaya asing yang masuk begitu deras. Budaya global yang seragam sering kali mengancam nilai-nilai asli yang menjadi kekuatan bangsa, sehingga kita membutuhkan cara bertahan yang lebih cerdas. Di sinilah pentingnya penggunaan *smart power*, yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan fisik militer dengan daya tarik budaya asli Indonesia. Melalui cara ini, Indonesia bisa membangun pengaruh dan nama baik di tingkat dunia tanpa harus bergantung pada cara-cara kekerasan atau paksaan (Nye, 2004)

Dengan menjadikan kekayaan budaya sebagai alat strategi, Indonesia berpeluang menciptakan "benteng sosial" yang mampu melindungi masyarakat dari tekanan luar. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana strategi pertahanan negara bisa berubah dengan memanfaatkan diplomasi budaya secara lebih nyata. Fokus utamanya adalah mengubah fungsi kegiatan budaya dari yang biasanya hanya sekadar acara seremoni atau pajangan, menjadi strategi pertahanan yang menjaga mentalitas bangsa. Harapannya, tulisan ini bisa membantu memperkuat pemahaman warga negara agar lebih tangguh menghadapi tantangan dunia yang terus berubah.

Masalah utama yang sering terabaikan adalah kerentanan integrasi nasional akibat mudahnya apresiasi terhadap keberagaman lokal. Di era digital, masyarakat cenderung lebih mudah terpapar budaya populer dunia yang seragam dibandingkan mengenal nilai-nilai luhur dari daerahnya sendiri. Jika identitas budaya ini hilang, maka fondasi kedaulatan kita akan rapuh karena tidak ada lagi "lem" sosial yang kuat untuk menyatukan perbedaan suku dan agama di Indonesia. Kekosongan identitas inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melakukan infiltrasi kepentingan secara halus.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sistem pendidikan saat ini masih berjuang keras menjaga agar jati diri siswa tidak tergerus oleh tren global yang sangat dominan di media sosial. Tanpa adanya filter mental yang kuat, generasi muda berisiko kehilangan karakter aslinya dan menjadi asing di tanah air sendiri. Padahal, ketahanan nasional yang sejati dimulai dari keyakinan generasi penerus akan nilai-nilai bangsanya. Oleh sebab itu, penting untuk memilah sejauh mana lingkungan pendidikan dapat menjadi garis depan dalam menjaga kedaulatan identitas ini.

Selain itu, sering kali terjadi jarak antara kebijakan pemerintah di tingkat pusat dengan realitas kebutuhan masyarakat adat di daerah terpencil atau perbatasan. Tanpa kehadiran nyata negara dalam melindungi kearifan lokal secara fisik dan administratif, kedaulatan budaya kita di wilayah-wilayah strategis tersebut akan sangat mudah goyah. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana sinkronisasi antara kebijakan kedaulatan nasional dan pelestarian budaya lokal harus dijalankan. Penulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan nasional di masa depan.

Indonesia bisa disebut sebagai negara plural yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negaranya. Pancasila adalah pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara untuk mempererat rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar sebagai kereterealisasinya sistem pengelolaan tertata demi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Pancasila sebelum disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang mengimplementasikan di dalam setiap silanya sudah ada dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga sangat tepat apabila pancasila dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara bersifat dinamis dan terbuka dengan perubahan zaman, artinya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dalam berbagai kondisi zaman yang terus mengalami perubahan.

Poin-poin yang telah dipaparkan merupakan manifestasi dari ketahanan nasional dalam memitigasi disrupsi industri, yang didefinisikan sebagai fenomena inovasi masif di mana teknologi konvensional berbasis fisik bertransformasi menjadi teknologi digital yang lebih mutakhir dan efisien. Fenomena ini memicu perubahan fundamental pada struktur kehidupan sosial, di mana masyarakat era disrupsi mulai mereposisi pola aktivitas mereka dengan mengandalkan teknologi demi mencapai efisiensi serta akselerasi kerja.

Hal ini kemudian menjadi instrumen konseptual kunci untuk memetakan dinamika perubahan yang dipicu oleh inovasi dan kreativitas kolektif masyarakat. Secara teoretis, pendekatan ini berfungsi mengidentifikasi realitas objektif masyarakat di era informasi digital yang menawarkan peluang akselerasi kemajuan; namun, kegagalan dalam mengoptimalkan peluang tersebut justru berpotensi memicu kerugian signifikan. Pada akhirnya, dampak positif akan tercapai apabila pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan pada orientasi kebijakan yang konstruktif di masa depan. (Karsayuda & Tektona, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk membedah secara tuntas bagaimana strategi *smart power* berperan sebagai instrumen pertahanan Indonesia. Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan ruang interpretasi yang mendalam terhadap fenomena geopolitik dan kebijakan strategis yang bersifat dinamis. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang berkaitan dengan implementasi *smart power* dalam kerangka ketahanan nasional.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan teknik studi pustaka (*library research*) yang bersifat integratif. Peneliti menelusuri berbagai dokumen resmi negara seperti Undang-Undang, jurnal akademis bereputasi, serta literatur kebijakan internasional yang relevan dengan diskursus *soft power* dan *hard power*.

Selain itu, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk membedah bagaimana elemen *soft power* dan *hard power* diimplementasikan dalam konteks kebijakan luar negeri. Proses ini melibatkan reduksi data untuk memilah informasi yang paling krusial, diikuti dengan triangulasi sumber guna memastikan validitas dan objektivitas temuan.

Peneliti berupaya menyatukan teori geostrategi dengan realitas kebijakan pertahanan Indonesia di era globalisasi, guna menghasilkan sebuah efektivitas mengenai *smart power* sebagai fondasi pertahanan bangsa yang holistik. Seluruh alur penelitian ini kami jalankan melalui lima tahapan strategis yang saling menyambung sebagai berikut:



Gambar

1. Tahapan Alur Penelitian

1. Research

Tahap ini merupakan fase awal untuk memetakan teori-teori pertahanan terkini dan membandingkannya dengan realitas geopolitik di lapangan. Fokus kami di sini bukan hanya sekadar mengumpulkan data, melainkan mencari celah untuk melihat bagaimana strategi pertahanan konvensional kita perlu bertransformasi agar lebih lincah dan adaptif dalam menghadapi tantangan di era digital yang sangat cepat berubah.

2. Planning

Tahap ini difokuskan pada penggabungan kekuatan militer dan daya tarik budaya menjadi strategi kekuatan cerdas yang integratif. Kekuatan keras berfungsi sebagai pedang pelindung kedaulatan, sedangkan kekuatan lunak menjadi cermin yang memancarkan pesona diplomasi bangsa. Sinergi ini memposisikan diplomasi sebagai ujung tombak untuk meraih kepercayaan internasional tanpa mengabaikan militer sebagai benteng pertahanan terakhir.

3. Teamwork

Tahap ini menjadi ruang bagi kami untuk menyintesis berbagai pemikiran para ahli dengan fakta empiris yang ada. Kami merangkai kepingan-kepingan data tersebut menjadi sebuah narasi yang padu, sehingga posisi tawar Indonesia di mata internasional bisa dijelaskan sebagai perpaduan antara kekuatan militer yang disegani sekaligus daya tarik budaya yang memikat.

4. Execution

Ini adalah bagian inti di mana kami membedah data secara lebih mendalam. Kami menafsirkan bagaimana pergeseran paradigma pertahanan negara harus mampu merespons disrupsi informasi saat ini. Fokus kami adalah membuktikan bahwa diplomasi budaya bukan sekadar pelengkap, melainkan perisai non-fisik yang krusial untuk melindungi jati diri bangsa dari intervensi luar.

5. Feedback

Pada tahap akhir, kami melakukan validasi terhadap seluruh temuan penelitian dengan membandingkannya terhadap tantangan kedaulatan yang kita hadapi hari ini. Proses ini menjadi landasan bagi kami untuk menyimpulkan poin-poin penting serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan geostrategi Indonesia ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam konstelasi pergaulan internasional saat ini masih berada pada tingkat dependensi yang signifikan terhadap kekuatan global. Sebagai negara berkembang yang tengah mengakselerasi pertumbuhan, Indonesia masih sangat bergantung pada penetrasi investasi asing, proses alih teknologi, serta dukungan finansial internasional untuk menyokong stabilitas pembangunan nasional. Fenomena ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi domestik belum sepenuhnya memiliki daya tahan mandiri terhadap fluktuasi kebijakan ekonomi negara-negara maju.

Kondisi tersebut secara linear menciptakan tantangan kompleks dalam menjaga kedaulatan nasional. Ketergantungan ekonomi sering kali menjadi faktor determinan yang membatasi ruang gerak pemerintah dalam merumuskan keputusan strategis yang bersifat otonom. Dalam banyak kasus, tekanan dari aktor-aktor ekonomi global dapat memengaruhi arah kebijakan publik, sehingga tercipta dilema antara kebutuhan akan modal asing dengan prinsip kemandirian bangsa.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanpa adanya strategi penguatan industri dalam negeri dan diversifikasi mitra kerja sama, ketergantungan ini berpotensi melemahkan posisi tawar (*bargaining power*) Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan ekonomi dan strategi keamanan nasional untuk memastikan bahwa setiap investasi dan bantuan luar negeri tidak mengompromikan integritas kedaulatan negara dalam jangka panjang.

Transformasi menuju kemandirian teknologi dan penguatan pasar domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat bertransisi dari negara yang dependen menjadi pemain global yang berpengaruh. Penggunaan kekuatan militer semata terbukti tidak lagi memadai dalam menghadapi dinamika ancaman modern.

Gangguan terhadap ketahanan nasional saat ini lebih banyak muncul melalui tekanan diplomatik dan klaim sepihak terhadap aset kebudayaan maupun wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *smart power* yang

menggabungkan kesiapan fisik militer dengan penguatan jati diri bangsa agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan tidak sekadar menjadi pengikut dalam arus globalisasi.

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah pengaruh besar dari simbol identitas terhadap pengakuan internasional. Kebijakan sederhana namun konsisten, seperti penggunaan batik dalam agenda kerja atau pementasan tarian tradisional pada acara kenegaraan, mengirimkan pesan bahwa Indonesia memiliki karakter yang kuat. Ketika suatu bangsa menunjukkan kebanggaan atas jati dirinya, negara lain akan cenderung memberikan penghormatan diplomatik yang lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam menyentuh batas-batas kedaulatan kita.

Tabel 1. Strategi Utama Ketahanan Nasional

Aspek Utama	Apa yang Dilakukan?	Hasil yang Dicapai
Politik	Membuat kebijakan luar negeri yang tegas.	Negara aman dari intervensi atau pengaruh buruk pihak asing.
Pendidikan	Memperkuat Karakter siswa di sekolah.	Siswa punya Fondasi mental dan jiwa kuat agar tidak mudah ikut arus global.
Budaya	Mempromosikan jati diri bangsa (Batik, Lukisan, Tarian, dll).	Indonesia lebih dihormati dan punya wibawa di mata dunia.
Militer	Menjaga keamanan Fisik dan Perbatasan.	Negara aman dari gangguan atau ancaman pihak asing.

Budaya terbukti menjadi unsur yang sangat penting karena berperan sebagai identitas pemersatu di tengah kemajemukan masyarakat yang dapat di optimalkan di seluruh aspek baik Politik, Pendidikan, Maupun Militer. Dalam era globalisasi, ancaman paling berbahaya adalah upaya pihak luar dalam memecah belah kedaulatan melalui isu perbedaan suku atau agama. Dengan mengedepankan budaya nasional yang menghargai keberagaman, masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat sehingga tidak mudah terprovokasi oleh agenda asing yang bertujuan melemahkan persatuan nasional dari dalam.

Fenomena globalisasi merupakan realitas objektif yang tidak dapat dielakkan, yang pada prosesnya mengonstruksi pola interaksi antarbangsa yang bersifat interdependensi dan saling melengkapi. Seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan sistem transportasi, pemerintah terus mengupayakan strategi optimal agar posisi Indonesia tetap kompetitif di kancah internasional. Kendati demikian, dinamika ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap persistensi identitas serta jati diri nasional, di mana terdapat ekspektasi besar bagi generasi muda untuk mampu mentransmisikan warisan serta tradisi bangsa kepada generasi mendatang. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah sangat krusial untuk mengasistensi dan memfasilitasi generasi muda dalam upaya pelestarian budaya multikultural yang menjadi karakteristik fundamental negara Indonesia. (Dewantara & Nurgiansah, 2021)

Pembahasan

Penerapan geostrategi melalui kerangka *smart power* sangat diperlukan karena posisi Indonesia yang strategis menjadikannya titik rebutan kepentingan global. Tanpa strategi yang matang dalam mengelola potensi budaya dan pertahanan, kekayaan sumber daya alam kita hanya akan dimanfaatkan oleh negara-negara besar. Strategi ini menjadi alat untuk memastikan bahwa setiap kerja sama atau investasi yang masuk tidak merusak kedaulatan politik dan martabat bangsa di mata dunia.

Geostrategi merupakan aspek fundamental bagi setiap bangsa, termasuk Indonesia, karena sebuah negara memerlukan kerangka strategis dalam mengimplementasikan kebijakan nasional guna mengakselerasi pembangunan manusia secara holistik. Hal ini mencakup integrasi antara dimensi fisik-materiil dan mental-spiritual, serta keseimbangan antara aspek lahiriah dan batiniah masyarakat. (Karsayuda & Tektona, 2021)

Luasnya bentang geografis Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke serta dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote secara astronomis terletak pada posisi 94.45 BT, dan 141.05 BT, 06.08 LU, 11.15 LS merupakan hambatan struktural dalam upaya pemerataan pendapatan nasional. Kondisi ini menjadi tantangan krusial bagi pemerintah dalam merumuskan solusi strategis guna menjamin keadilan proporsional bagi setiap warga negara.

Meskipun pada praktiknya, diskursus mengenai keadilan sering kali berhadapan dengan kompleksitas ketidakadilan dan ambiguitas akibat berada dalam ruang lingkup implementasi yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Hambatan dalam upaya melakukan pemerataan pendapatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mencari solusi agar setiap individu memperoleh keadilan secara proporsional sesuai dengan haknya, meskipun konsep keadilan selalu dibenturkan dengan ketidakadilan dan keraguan karena berada pada wilayah yang labil dan goyah.

Terlepas dari perdebatan mengenai relativitas keadilan, kedudukan pemerintah sebagai pengayom sekaligus pemegang mandat memiliki kewajiban konstitusional untuk meregulasi kesejahteraan umum secara inklusif. Hal ini selaras dengan amanat sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta manifestasi dari prinsip negara hukum materiil atau *welfare state* yang diimplementasikan dalam sistem kenegaraan Indonesia

Dengan demikian, geostrategi adalah upaya menggunakan atau memanfaatkan kondisi wilayah untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga geostrategi Indonesia bukan untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan semata melainkan kesejahteraan dan keamanan untuk seluruh rakyat Indonesia. (Sudjana, 2019).

Implementasi geostrategi yang optimal merupakan instrumen krusial bagi Indonesia dalam mengeskalasi peran internasional sekaligus memproteksi kepentingan nasional di tengah fluktuasi dinamika global. Dalam perspektif militer, Indonesia mengadopsi doktrin Wawasan Nusantara, yang mengonseptualisasikan seluruh ruang wilayah nasional sebagai satu kesatuan pertahanan yang terintegrasi dari Sabang hingga Merauke. Kebijakan pertahanan dan keamanan nasional difokuskan pada perlindungan integritas teritorial serta kedaulatan negara terhadap berbagai spektrum ancaman, baik eksternal maupun internal. Secara praktis, penguatan kekuatan militer diprioritaskan pada zona-zona strategis, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan wilayah perbatasan negara.

Ketahanan nasional merepresentasikan kapabilitas sebuah negara dalam memproteksi integritas teritorial, kedaulatan, serta stabilitas keamanan dari berbagai spektrum ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari ranah domestik maupun mancanegara. Dalam konteks ini, geostrategi hadir sebagai paradigma strategis yang mendayagunakan kondisi geografis guna mengoptimalisasi potensi nasional sekaligus memperkuat daya tangkal negara terhadap tantangan global.

Di Indonesia, gagasan yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno ini diwujudkan melalui prinsip fleksibilitas nasional. Geostrategi Indonesia sendiri memiliki karakteristik fundamental yang bersifat mandiri, dinamis, integratif, konsultatif, serta kolaboratif. Implementasi geostrategi Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan manajemen sumber daya alam yang melimpah, mencakup sektor migas, mineral, dan kekayaan maritim.

Pemanfaatan sumber daya tersebut secara strategis dan berkelanjutan menjadi instrumen krusial dalam memperkokoh posisi tawar Indonesia dalam konstelasi ekonomi global. Selain itu, potensi besar pada sektor pariwisata yang berbasis pada estetika alam dan pluralitas budaya turut menjadi fokus geostrategi melalui penguatan infrastruktur serta eskalasi promosi internasional. Langkah ini bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat dunia. (An Nafiah & Slam, 2024)

Hal ini memaksa negara mitra untuk melihat Indonesia sebagai rekan kerja sama yang setara dan memiliki prinsip, bukan sekadar penyedia sumber daya semata. Solusi nyata untuk mempertahankan geostrategi ini harus dilakukan melalui langkah bertahap yang melibatkan semua lapisan masyarakat, dimulai dari dunia pendidikan.

Oleh karena itu, implementasi geostrategi di Indonesia bersifat multidimensi karena mencakup berbagai spektrum kehidupan nasional yang kompleks. Intisari dari paradigma ini terletak pada efektivitas Indonesia dalam mendayagunakan letak geografisnya yang strategis guna mengeskalasi kepentingan nasional, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas keamanan di tingkat regional maupun global. (Assoc. Prof. Dr. Ir. Aris Sarjito et al., 2023).



Data pada Gambar 2 menonjolkan sektor pendidikan sebagai pilar kedaulatan yang paling dominan dengan porsi 35%. Fokus besar pada aspek edukasi ini mencerminkan bahwa ketangguhan sebuah negara berakar pada cara berpikir generasi muda. Dengan porsi pendidikan yang kuat, siswa dibekali 'filter' mental yang kokoh untuk menghadapi arus globalisasi. Hal ini kemudian disokong oleh kesiagaan militer (25%) serta ketegasan politik (20%) dan diplomasi budaya (20%) demi menjaga wibawa Indonesia agar tetap mandiri dan terbebas dari segala bentuk intervensi asing.

Menurut (Priyono, 2017) Ketahanan Nasional Indonesia didefinisikan sebagai kondisi dinamis bangsa yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan nasional dengan berlandaskan pada nilai keuletan dan ketangguhan. Konsep ini mencakup kapabilitas dalam mengembangkan kekuatan kolektif guna mengidentifikasi serta menanggulangi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG), baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Secara substansial, upaya ini bertujuan untuk memproteksi identitas, integritas, dan keberlangsungan eksistensi negara demi tercapainya cita-cita nasional. Dalam konteks ini, Ketahanan Nasional dipandang sebagai realitas objektif saat ini sekaligus visi ideal yang harus dicapai melalui implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional yang sistematis.

Penguatan ketahanan melalui pendidikan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran siswa untuk menghargai jati diri melalui pembiasaan sederhana, seperti penggunaan atribut budaya atau apresiasi terhadap karya lokal di lingkungan sekolah.

Langkah ini merupakan bentuk pertahanan diri paling dasar agar identitas siswa tidak hilang akibat pengaruh tren global. Dengan mengenali akarnya, generasi muda akan memiliki filter mandiri dalam menyerap pengaruh asing tanpa kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia (Ardhita et al., 2025)

Selain itu, Integrasi penguatan identitas nasional dalam kerangka pendidikan multikultural mengindikasikan bahwa konstruksi jati diri bangsa sejatinya berorientasi pada internalisasi nilai secara individual. Institusi pendidikan memegang peranan krusial sebagai ruang inkubasi untuk menanamkan patriotisme dan kecintaan terhadap kebudayaan lokal pada peserta didik. Strategi penguatan tersebut dapat diimplementasikan melalui kebijakan sekolah yang berfokus pada pembentukan karakter, seperti regulasi mengenai kewajiban penggunaan bahasa daerah, standarisasi pakaian adat, serta penetapan hari wajib batik daerah. Selain itu, penyediaan sarana fisik khusus sebagai pusat pengenalan budaya daerah di sekolah menjadi instrumen penting dalam mentransformasi pola pikir siswa terhadap urgensi pelestarian warisan budaya.

Eksistensi pendidikan multikultural saat ini perlu diadaptasi secara dinamis selaras dengan akselerasi teknologi informasi dan keniscayaan arus globalisasi. Upaya diseminasi budaya nasional dapat dioptimalisasi melalui produksi konten kreatif bertema identitas Indonesia sebagai instrumen diplomasi budaya di kancah internasional. Dalam merespons penetrasi budaya asing, diperlukan

Mekanisme filtrasi yang selektif guna memastikan bahwa adopsi nilai luar tetap berorientasi pada kemajuan nasional tanpa mengerosi jati diri bangsa. Sebab, kredibilitas sebuah bangsa di mata dunia sangat bergantung pada konsistensi dalam mempertahankan identitasnya. Oleh karena itu, masifnya globalisasi

seharusnya dieksploitasi secara strategis untuk mengamankan dampak positif bagi pembangunan nasional. (Edi, 2021)

Peran pemerintah sangat krusial untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat, bukan sebatas pada tataran retorika atau imbauan semata. Pemerintah harus turun langsung dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat adat, melindungi situs budaya, hingga memastikan kesejahteraan warga di wilayah terluar. Kehadiran fisik pemerintah di lapangan memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi rakyat bahwa negara benar-benar hadir untuk membela kepentingan dan identitas mereka di tengah arus perubahan zaman.

Pada lingkup kebijakan nasional, pemerintah pusat perlu menerapkan prinsip timbal balik yang tegas dalam setiap perjanjian internasional. Kerja sama ekonomi harus disertai dengan komitmen negara mitra untuk menghormati kedaulatan dan identitas Indonesia. Diplomasi budaya yang dijalankan secara konsisten dalam setiap kontrak internasional berfungsi sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa bermartabat yang mengutamakan kedaulatan di atas sekadar keuntungan materi jangka pendek. (Pebrian & Yulianingrum, 2023).

Menurut (Ahmad Fanani et al., 2024) Pertahanan Indonesia harus mengoptimalkan diplomasi sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas kawasan, khususnya dengan negara ASEAN dan kekuatan global seperti Amerika Serikat serta Tiongkok. Penguatan peran dalam forum multilateral seperti ADMM dan EAS sangat penting untuk memastikan kawasan Indo Pasifik tetap kondusif. Selain itu, pembangunan postur pertahanan yang modern dan adaptif menjadi prioritas utama guna menjaga kedaulatan wilayah secara berkelanjutan.

Urgensi penguatan kapabilitas militer menjadi kian krusial, khususnya pada wilayah perbatasan dan zona maritim strategis seperti Laut Natuna Utara. Indonesia memerlukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), penguatan armada angkatan laut, serta optimalisasi sistem pengawasan udara dan maritim yang terintegrasi. Stabilitas keamanan nasional diwujudkan melalui akselerasi program pengembangan infrastruktur pertahanan, mencakup pembangunan pangkalan militer di titik-titik vital serta eskalasi kualitas teknologi pertahanan dalam negeri. Postur pertahanan yang tangguh diharapkan mampu menciptakan efek gentar (*deterrence effect*) terhadap potensi ancaman eksternal, sehingga memitigasi risiko konflik yang dapat menghambat akselerasi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik nasional.

Selain langkah-langkah di atas, penguatan geostrategi ini memerlukan sistem evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap relevan dengan perubahan zaman. Pemerintah perlu memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya tersebut secara lebih luas dan modern melalui platform global. Penggunaan teknologi digital di sini bukan hanya bertujuan untuk promosi pariwisata, melainkan sebagai alat strategis untuk memperkuat narasi positif tentang jati diri bangsa di tengah derasnya arus informasi asing. (Purwantoro & Dr. Rahmat Fadhli, 2023).

Pemanfaatan teknologi yang tepat juga berfungsi sebagai sarana untuk merespons ancaman informasi atau klaim budaya dari pihak luar secara cepat dan akurat. Dengan adanya basis data kebudayaan yang kuat dan terintegrasi, strategi *smart power* Indonesia tidak akan bersifat statis, melainkan terus berkembang

mengikuti dinamika global. Adaptasi teknologi ini menjadi jembatan agar nilai-nilai kedaulatan yang selama ini dijunjung tinggi dapat tetap relevan bagi generasi muda tanpa harus mengorbankan prinsip dasar kedaulatan nasional.

Sebagai penutup, kesatuan kolaborasi dari tingkat bawah hingga atas adalah syarat mutlak agar geostrategi Indonesia memberikan hasil yang maksimal. Penguatan militer tidak akan optimal tanpa dukungan rakyat yang kompak, dan semangat rakyat tidak akan berarti tanpa kehadiran nyata serta kebijakan pemerintah yang tegas. Melalui integrasi antara diplomasi budaya dan kesiapan fisik, Indonesia dapat menghadapi persaingan global dengan lebih baik, tetap mandiri secara prinsip, dan dihormati sebagai bangsa yang berdaulat.

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada tahun 2026 berada pada kondisi yang sangat dinamis dan menantang. Kita harus mengakui secara jujur bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan ekonomi serta kebutuhan akan alih teknologi dari kekuatan global untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Namun, ketergantungan tersebut tidak boleh menjadi celah bagi pelemahannya kedaulatan bangsa. Tantangan nyata saat ini bukan hanya terbatas pada ancaman militer fisik, melainkan juga serangan terhadap mentalitas dan jati diri bangsa melalui arus informasi global yang berisiko memecah belah persatuan nasional.

Penggunaan strategi *smart power* melalui diplomasi budaya menjadi solusi yang paling realistis untuk menjembatani antara kebutuhan investasi asing dan kewajiban menjaga harga diri nasional. Dengan menjadikan kekayaan budaya sebagai instrumen strategi yang aktif dan bukan sekadar pajangan seremonial, Indonesia dapat membangun posisi tawar yang lebih kuat dalam setiap negosiasi internasional. Budaya nasional berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan keberagaman, sehingga masyarakat memiliki benteng mental yang kokoh untuk menyaring berbagai pengaruh luar yang tidak sesuai dengan karakter asli bangsa.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memegang peranan strategis sebagai pilar pertahanan nirmiliter yang esensial dalam memitigasi berbagai ancaman nonmiliter. Kedudukan ini selaras dengan doktrin yang diamanatkan dalam Buku Putih Pertahanan Negara terbitan Kementerian Pertahanan.

Dalam kerangka penguatan pertahanan nasional, diplomasi budaya hadir sebagai instrumen yang efektif di tengah akselerasi globalisasi dan meningkatnya diversitas budaya global. Implementasi diplomasi budaya ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan kekuatan lunak (*soft power*).

Kementerian Luar Negeri, melalui fungsi diplomatiknya, bertindak sebagai katalisator dalam memitigasi kesenjangan pemahaman serta mengonstruksi kerja sama antarbangsa lewat instrumen pertukaran budaya, seni, pendidikan, dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan. Peran strategis institusi ini dalam ranah diplomasi budaya selaras dengan doktrin yang diamanatkan dalam Buku Putih Pertahanan Negara. Sebagai komponen integral dari pertahanan nirmiliter, diplomasi budaya tidak hanya terbatas pada dinamika relasi antarnegara dalam

spektrum politik dan keamanan konvensional, namun juga mencakup dimensi sosiokultural yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan nasional.

Akselerasi inovasi teknologi informasi telah merekonstruksi lanskap global, sekaligus menggeser paradigma diplomasi konvensional menuju bentuk modern yang lebih inklusif. Diplomasi tradisional, atau yang dikenal sebagai *first track diplomacy*, semula hanya menitikberatkan pada dialog antarelit pemerintahan dalam kerangka resolusi konflik. Namun, saat ini konsep tersebut telah bertransformasi menjadi model diplomasi yang mengintegrasikan entitas non-pemerintah serta mencakup diskursus mengenai isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, dinamika ekonomi, dan kebudayaan. Diplomasi modern tidak lagi terisolasi pada negosiasi antarpemerintah (G-to-G), melainkan telah melibatkan peran aktif aktor masyarakat sipil dalam merespons berbagai urgensi global yang mendesak.

Seiring kemajuan dinamika dunia, konsep diplomasi telah mengalami berbagai macam penyesuaian dan terbuka terhadap peluang yang muncul. Dalam mendukung proses diplomasi, beragam sarana digunakan, termasuk instrumen budaya. Diplomasi budaya berperan sebagai bagian dari *soft power*, tidak bersifat memaksa, melainkan memanfaatkan daya tarik. Di era ini, yang ditandai oleh globalisasi, masyarakat informasi, dan diplomasi jaringan, diplomasi budaya menjadi semakin krusial sebagai alat yang memegang peran penting dalam memahami dan menanggapi dinamika global. Di tengah era globalisasi dan modernisasi, kerja sama antarnegara menjadi elemen krusial dalam konteks hubungan internasional. Agar hubungan luar negeri dapat berkembang positif, setiap negara berusaha untuk menerapkan strategi diplomasi.

Diplomasi dan kebudayaan merupakan dua entitas yang memiliki korelasi simbiotik dan integratif. Kebudayaan berfungsi ganda, baik sebagai instrumen maupun tujuan strategis dalam setiap aktivitas diplomatis. Dalam praktiknya, diplomasi budaya tidak hanya mendayagunakan potensi kultural untuk memperkuat posisi diplomatik, tetapi juga memfungsikan jalur diplomasi sebagai sarana proteksi dan pelestarian keberlanjutan budaya. (Alisyah Rahma Saebani & Irwan Triadi, 2023)

Manfaat geostrategi bagi ketahanan nasional Indonesia mencakup berbagai spektrum kehidupan bernegara yang kompleks. Optimalisasi posisi strategis ini memungkinkan negara untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat kolaborasi lintas negara. Selain itu, geostrategi diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang adaptif terhadap kondisi geografis serta keberagaman budaya lokal. Efektivitas dalam pengelolaan aspek-aspek tersebut secara langsung berdampak pada penguatan martabat Indonesia di mata dunia, sekaligus menjadi fondasi bagi keberlangsungan pembangunan nasional yang stabil.

Secara komprehensif, geostrategi Indonesia berfokus pada optimalisasi posisi geografis guna mengakselerasi kemajuan nasional di berbagai sektor sembari mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun dihadapkan pada fluktuasi dinamika global yang kompleks, perencanaan strategis dan implementasi yang efektif memungkinkan Indonesia untuk mendayagunakan letak geografisnya secara maksimal demi mewujudkan kesejahteraan bangsa.

Keberhasilan geostrategi ini menuntut langkah nyata yang dimulai dari dunia pendidikan sebagai fondasi paling dasar. Penguatan identitas siswa melalui pembiasaan budaya lokal di sekolah merupakan cara konkret untuk menciptakan filter mandiri bagi generasi muda agar tidak tergerus oleh tren global yang dominan. Di sisi lain, pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh hanya berhenti pada imbauan normatif, tetapi harus hadir secara fisik di lapangan untuk melindungi kearifan lokal serta berani menerapkan prinsip timbal balik yang adil dalam setiap kerja sama dengan mitra internasional.

Pada akhirnya, masa depan kedaulatan Indonesia sangat bergantung pada kesatuan kolaborasi dari lingkup bawah hingga tingkat atas. Sinergi antara rakyat yang bangga akan jati dirinya, militer yang siaga menjaga martabat, serta pemerintah yang tegas dalam kebijakan akan menciptakan ekosistem pertahanan yang utuh. Melalui integrasi diplomasi budaya yang modern dan adaptasi teknologi yang cerdas, Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa maju yang tetap dihormati secara berdaulat. Ketahanan nasional yang sejati tercapai ketika kita mampu merangkul kemajuan dunia tanpa harus kehilangan akar dan martabat sebagai bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fanani, I Wayan Midhio, & Afrizal Hendra. (2024). TANTANGAN PERTAHANAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS 2045. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 379–391. <https://doi.org/10.55314/tsg.v5i4.858>
- Alisya Rahma Saebani & Irwan Triadi. (2023). Peran Diplomasi Budaya Dalam Menanggapi Tantangan Globalisasi Dan Perbedaan Budaya Untuk Meningkatkan Pertahanan Nasional Di Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 200–207. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1865>
- An Nafiah, F. N., & Slam, Z. (2024). MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN GEOSTRATEGI DI INDONESIA. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 19(2), 66. <https://doi.org/10.20961/pknp.v19i2.82090>
- Ardhita, F. P., Mulyasaroh, M., & Nulhakim, L. (2025). Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pilar Penguatan Identitas Lokal di Lingkungan SMA. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(3), 2035–2041. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.3890>
- Assoc. Prof. Dr. Ir. Aris Sarjito, S. T. M. A. P. I. P. U. A. A. E., Editha Praditya Duarte, S. S. M. I. S. M. A., & Perwita, P. A. A. B. (2023). *Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan: Tantangan Keamanan Global*. Indonesia Emas Group. <https://books.google.co.id/books?id=s1vXEAAAQBAJ>
- Buzan, B. (2008). *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. ECPR Press. <https://books.google.co.id/books?id=WfAXEQAAQBAJ>
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Building Tolerance Attitudes Of PPKN Students Through Multicultural Education Courses. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(1), 103–115. <https://doi.org/10.26618/jed.v6i1.4503>

- Edi, A. S. (2021). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN IDENTITAS NASIONAL DALAM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 441–447. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2291>
- Karsayuda, H. M. R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jkn.65002>
- Mearsheimer, J. J. (2003). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton. https://books.google.co.id/books?id=IDzCD_C_ipoC
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means To Success In World Politics*. PublicAffairs. <https://books.google.co.id/books?id=hTBxIMnpMloC>
- Pebrian, A., & Yulianingrum, A. V. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 264–276. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.5014>
- Lukluk, Z., Fitriyah, Zaenul, S./ *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 21(1), 1-18
- Priyono, J. (2017). Uji falsifikasi konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi indonesia. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara*, 7(2), 81–96.
- Purwantoro, S. A., & Dr. Rahmat Fadhli, E. M. (2023). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Menyongsong Indonesia Emas 2045*. Indonesia Emas Group. https://books.google.co.id/books?id=CzS_EAAAQBAJ
- Sudjana, S. (2019). Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi Sebagai Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 1–10.